

Diskriminasi dan Peminggiran Jurnalis Perempuan dalam Industri Media di Indonesia

<http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v8i2.449>

Famega Syavira Putri

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia

Jln. Salemba Raya No 4, Jakarta 10430 - Indonesia

E-mail korespondensi: famega.syavira@ui.ac.id

Submitted: 17 Oktober 2025, **Revised:** 6 Desember 2025, **Accepted:** 10 Desember 2025
Terakreditasi SINTA-4 SK Kemristekdikti No. 72/E/KPT/2024 sampai Vol 10(2) tahun 2027

Abstract - Female journalists in Indonesia continue to experience various forms of discrimination and marginalization, even within the media institutions where they work. This inequality is evident not only in daily professional practices but also in access to strategic positions in newsrooms. This paper aims to examine the condition of women's leadership in Indonesian media organizations as well as the realities faced by female journalists in carrying out their profession. Findings that indicate the persistence of gender-based discrimination and inequality in leadership positions within newsrooms can be more deeply understood through the framework of muted group theory, which emphasizes how subordinate groups are structurally constrained in expressing their experiences and interests within communication systems dominated by those in power. This study employs a literature review method using secondary data sources. A review of 16 scholarly works shows that female journalists continue to face discrimination based on gender, including role stereotyping, gender-biased assignment of news coverage, and the double burden of balancing professional work with domestic responsibilities. Moreover, women's representation in top leadership positions within the media remains very limited. Of the 1,861 media organizations registered with the Press Council, only 65 are led by women. These findings indicate that the structure of the media industry in Indonesia has not yet become fully inclusive of women, both as media workers and as decision-makers.

Keywords: Journalism, Women, Leadership, Gender Equality, Muted Group Theory

Abstrak - Jurnalis perempuan di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan peminggiran, bahkan di dalam institusi media tempat mereka bekerja. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam praktik kerja sehari-hari, tetapi juga dalam akses terhadap posisi strategis di ruang redaksi. Tulisan ini bertujuan untuk memformulasikan bagaimana kondisi kepemimpinan perempuan di perusahaan media di Indonesia serta bagaimana realitas yang dihadapi jurnalis perempuan dalam menjalankan profesinya. Temuan-temuan yang menunjukkan masih kuatnya diskriminasi berbasis gender serta ketimpangan dalam posisi kepemimpinan di ruang redaksi dapat dipahami secara lebih mendalam melalui kerangka muted group theory, yang menekankan bagaimana kelompok subordinat dibatasi dalam menyuarakan pengalaman dan kepentingannya dalam struktur komunikasi yang didominasi kelompok berkuasa. Penelitian ini menggunakan metode ulasan literatur dengan pengambilan data sekunder. Ulasan terhadap 16 literatur menunjukkan bahwa jurnalis perempuan masih mengalami diskriminasi berdasarkan gender, termasuk stereotip peran, pembagian liputan yang bias,

serta beban ganda antara pekerjaan profesional dan tanggung jawab domestik. Selain itu, representasi perempuan dalam posisi puncak kepemimpinan media juga masih sangat rendah. Dari 1.861 perusahaan media yang tercatat di Dewan Pers, hanya 65 media yang dipimpin oleh perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa struktur industri media di Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif terhadap perempuan, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengambil keputusan.

Kata kunci: Jurnalisme, Perempuan, Kepemimpinan, Kesetaraan Gender, Muted Group Theory

PENDAHULUAN

Jurnalis laki-laki masih mendominasi pers Indonesia, adalah kalimat pertama dalam kata pengantar Laporan Riset Diskriminasi Gender di Organisasi Media yang diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI, 2023). Sasmito, Ketua Umum AJI Indonesia, dalam laporan tersebut mengatakan, ada beberapa bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja di media. Faktornya beragam, mulai dari rekrutmen jurnalis yang lebih mengutamakan laki-laki, hingga adanya budaya patriarki yang masih mengakar di Indonesia.

Survey AJI terhadap 405 jurnalis perempuan di 34 provinsi pada 4-18 April 2022 menemukan adanya diskriminasi gender di organisasi media, yang terbagi dalam enam aspek. Enam hal yang menjadi fokus riset tersebut adalah remunerasi, tugas peliputan, hak cuti, pengurangan karyawan, rapat redaksi dan promosi. Sekitar 27 persen responden mengungkapkan masih adanya diskriminasi gender yang meminggirkan jurnalis perempuan.

AJI menulis, angka ini lebih dari seperempat dan tidak dapat diabaikan, karena merugikan pekerja perempuan, dan lebih luas lagi, berdampak pada publik yang menjadi fokus pelayanan media berita. Banyak perempuan memilih untuk tidak lagi bekerja sebagai jurnalis, padahal keterwakilan perempuan dalam jurnalisme adalah suatu keharusan dalam pelayanan jurnalisme kepada publik (AJI, 2023).

Agar dipandang berhasil, jurnalis perempuan harus bekerja lebih keras daripada jurnalis laki-laki. Seperti ketika liputan di wilayah konflik, usaha keras ini diperlukan sebab kemampuan mereka dipertanyakan karena identitasnya sebagai perempuan (Widyaningtyas et al, 2023). Perlindungan hukum pada kerja-kerja jurnalis perempuan di lapangan, misalnya dalam ketika meliput demonstrasi sebenarnya sudah ada, tapi hanya di atas kertas dan perlu penerapan hukum dan perlindungan ekstra agar perempuan dapat menjalankan tugasnya dengan persaan aman (Hardiyanti, 2021).

Kesenjangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Studi mengenai perempuan dan kepemimpinan di media berita yang dilakukan oleh Reuters Institute dan Universitas Oxford (2023) di 12 negara, di semua negara tersebut, mayoritas editor papan atas adalah laki-laki, termasuk di negara di mana jumlah jurnalis perempuan lebih banyak dari laki-laki. Hanya ada 22 persen perempuan dari 180 editor papan atas di 240 perusahaan media. Padahal, 40 persen jurnalis di 12 negara itu adalah perempuan. Padahal, kepemimpinan perempuan penting karena pemimpin perempuan membawa perubahan bagi organisasinya ke arah kesetaraan gender dalam aspek-aspek kerja media (O'Brien, 2016).

Lalu bagaimana di Indonesia? Tujuan penelitian ini Adalah untuk mencari tahu kondisi kepemimpinan perempuan di perusahaan media di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi jurnalis perempuan di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan menelaah bagaimana kondisi kepemimpinan perempuan di perusahaan media dan kondisi jurnalis perempuan Indonesia yang masih berada di bawah bayang-bayang dan dominasi laki-laki. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman dengan menggunakan *Muted Group Theory*, atau Teori Kelompok Terbungkam. Dalam dunia yang serba digital sekarang, orang-orang memperoleh informasi dan pengetahuan tentang dunia ini dari media massa, baik dalam bentuk *online*, televisi, maupun media cetak. Berbagai produk media dengan retorika dan bahasanya itu tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, politik dan sejarah dalam pembuatannya. Inilah kenapa keterwakilan adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan (Long, Paul; Wall, 2012). Sebab, keterwakilan memberikan informasi mengenai kelompok dan budaya, di mana khalayak media sendiri menjadi bagiannya maupun yang asing, dan mempengaruhi hubungan sosial ke depannya.

Muted group theory merupakan teori komunikasi yang awalnya dicetuskan oleh suami istri antropologis, Shirley Ardener dan Edwin Ardener pada tahun 1975. Mulanya, mereka mencari penjelasan kenapa suara perempuan dan perspektif perempuan tidak muncul dalam studi antropologi (Barkman, 2018). Teori ini berfokus pada sekelompok khalayak dalam masyarakat yang “dibungkam” atau terpinggirkan. Hipotesis teori ini adalah bahwa kelompok yang tidak punya suara adalah sekelompok orang di masyarakat yang tidak punya kekuatan apa pun, dan mereka kesulitan mengkomunikasikan atau menyuarakan kepentingan mereka dalam masyarakat karena bahasa dan gaya berkomunikasi kelompok ini tidak diberikan kedudukan yang sama dengan kelompok dominan. Agar didengar, kelompok yang berada pada kedudukan yang lebih rendah ini harus mengganti tatanan bahasa mereka ketika berkomunikasi secara publik. Jika menggunakan tatanan bahasa mereka sendiri, mereka tidak akan diperhatikan, seperti yang banyak terjadi pada perempuan. “Dibungkam” tidak berarti kelompok yang memiliki kekuatan lemah ini benar-benar tidak bersuara. Permasalahannya adalah apakah individu tersebut bebas untuk mengatakan apa yang ingin dia sampaikan, dalam kebebasan waktu dan tempat di mana mereka ingin memperdengarkan suaranya (Wall & Gannon-Leary, 1999).

Ardener, pada mulanya berasumsi bahwa kurangnya perhatian terhadap pengalaman perempuan merupakan masalah gender yang unik dalam antropologi sosial. Namun Ardener kemudian menyadari bahwa “*muted*” disebabkan oleh kurangnya kekuatan yang dimiliki oleh para kelompok tersebut. Ide utama dalam *muted group theory* adalah ketika dunia diciptakan oleh masyarakat golongan dominan. Kondisi ini tidak hanya terjadi khusus pada perempuan, tetapi juga kelompok minoritas lainnya. Masyarakat dominan menciptakan kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan, kelompok etnis minoritas dan kebudayaan lainnya yang perspektif dan pengalamannya secara tidak sengaja merepresentasikan atau bahkan tidak dipedulikan dalam struktur komunikasi dominan ini.

Arderer berpendapat bahwa bahasa dijadikan untuk memelihara struktur kekuatan dalam masyarakat. Kelompok dominan membentuk norma, nilai, konvensi bahasa yang mungkin tidak cukup menangkap pengalaman kelompok yang tidak bisa bersuara. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial memerlukan transformasi bahasa, yang memungkinkan kelompok yang dibungkam untuk mengartikulasikan pengalaman dan perspektif mereka tanpa dibatasi oleh wacana yang dominan.

Muted group theory dimodifikasi oleh beberapa pakar, khususnya Dale Spender dan Cherris Kramarae. Kramarae (2005) menulis bahwa teori *muted group* menyatakan bahwa orang-orang yang berada dalam kelompok subordinat (tidak hanya perempuan tetapi juga suku, ras, seksualitas dan kelas sosial) mungkin punya banyak hal untuk disampaikan, tetapi cenderung tidak punya banyak kekuatan untuk mengungkapkannya tanpa menghadapi masalah. Ucapan mereka sering diabaikan oleh kelompok dominan, pengetahuannya dianggap tidak cukup untuk proses pengambilan keputusan publik atau pembuatan kebijakan di masyarakat; pengalaman mereka diinterpretasikan oleh orang lain, dan mereka didorong untuk melihat dirinya hanya sebagai bagian dari wacana dominan. Teori *muted group* membantu memahami bagaimana kekuasaan berperan dalam cara manusia berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa.

Ada empat konsep utama dalam *muted group theory* (Meares, 2017). Pertama, keanggotaan dalam kelompok yang berbeda (misalnya, berdasarkan jenis kelamin, ras, orientasi seksual, dan lain-lain) menghasilkan pengalaman yang berbeda saat seseorang berinteraksi dalam masyarakat. Perbedaan ini membuat para anggota kelompok yang berbeda, memandang dunia dengan cara yang berbeda. Anggota kelompok dominan dalam suatu masyarakat mungkin memiliki pemahaman kolektif yang sangat berbeda dari lainnya. Misalnya, wanita dan pria dalam banyak budaya mungkin memahami dunia dengan cara yang berbeda, berdasarkan sosialisasi dan pengalaman mereka. Misalnya, dalam banyak budaya, laki-laki diharapkan menjadi pemimpin, sedangkan perempuan diharapkan untuk fokus menjadi ibu dan istri di rumah.

Kedua, komunikasi adalah sarana tempat berlakunya kekuasaan dan hak istimewa. Dalam setiap masyarakat, suara anggota kelompok tertentu, dalam hal ini laki-laki, dihargai atau

diistimewakan di atas yang lain. Hak istimewa ini diciptakan dan diperkuat melalui wacana sehari-hari. Anggota kelompok dominan mengendalikannya melalui norma-norma sosial interpersonal serta media massa. Mereka tidak hanya menetapkan agenda soal apa yang dibahas, tetapi juga bagaimana cara pembahasannya. Suara-suara lain didorong ke pinggiran, sehingga kelompok yang tidak dominan punya lebih sedikit kesempatan untuk mengemukakan ide, pendapat, persepsi, dan tujuan mereka dalam masyarakat. Narasi dan suara alternatif diredam atau dibungkam. Dalam hal gender, secara historis, laki-laki di banyak budaya mengendalikan saluran media dan lembaga, sehingga perempuan kurang memiliki kesempatan untuk didengar dalam pengambilan keputusan dan dalam peran kepemimpinan di luar rumah. Pada saat yang sama, komunikasi perempuan diremehkan dan masalah perempuan didefinisikan sebagai masalah yang kurang penting bagi masyarakat secara keseluruhan.

Konsep ketiga adalah bahwa anggota kelompok yang tidak dominan harus berkomunikasi secara publik dengan cara yang disetujui oleh budaya dominan agar masalah mereka didengar. Dalam hal bahasa dan gaya komunikasi, standar komunikasi dibentuk berdasarkan norma-norma kelompok dominan. Perempuan sebagai anggota kelompok yang dibungkam, harus berupaya membentuk komunikasi mereka agar dapat diterima oleh norma yang didominasi pria. Individu dan kelompok yang menantang norma kelompok dominan ini sering dinilai berbahaya, mengganggu, dan/atau tidak profesional. Misalnya, perempuan yang terlalu lugas dapat dikritik karena tidak cukup feminin sementara laki-laki memang diharapkan untuk bersikap lugas.

Terakhir atau keempat, adalah bahwa melalui komunikasi, mungkin ada perubahan. *Muted group theory* juga mengakui bahwa kekuasaan dan pembungkaman tidak abadi. Perubahan mungkin terjadi dan anggota kelompok yang tidak dominan bisa menolak pembungkaman. Dalam hal gender, alih-alih berasumsi bahwa mereka adalah korban ekspektasi masyarakat, perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi kreatif dan menantang norma komunikasi. Misalnya, perempuan bisa bicara tentang standar ganda yang terkait dengan komunikasi profesional, dan perlakuan berbeda yang dihadapi karyawan saat berkomunikasi di tempat kerja. Konsep keempat ini adalah sisi yang paling sulit dilakukan dalam *muted group theory*. Tidak semua anggota *muted group* punya keterampilan, keinginan, atau kepercayaan diri untuk terus-menerus bersuara di dalam lembaga yang dikendalikan oleh pihak dominan. Kondisi perempuan dalam industri media di Indonesia yang masih rendah membuka peluang untuk pemangku kepentingan mendorong industri media ke arah yang mengutamakan kepentingan publik dan melindungi pekerja media perempuan. Teori media feminis menganggap serius gender sebagai faktor yang menyusun identitas dan pengalaman. Asumsi yang telah lama mendominasi teori media feminis adalah: jika perempuan mengendalikan produksi media, konten akan berbeda dan lebih baik (Fortner dan Fackler, 2014).

Dalam konteks media, *muted group theory* menjelaskan bahwa produksi pengetahuan, narasi berita, dan representasi realitas sangat dipengaruhi oleh kelompok dominan yang menguasai institusi media. Karena media beroperasi dalam sistem sosial yang timpang, perspektif perempuan sering kali tidak menjadi pusat wacana, melainkan dipinggirkan atau disaring melalui sudut pandang dominan. Ardener menegaskan bahwa kelompok yang tidak berada dalam struktur kekuasaan komunikasi akan tetap muncul, tetapi tidak dianggap signifikan (Ardener, 1975). Dalam praktik jurnalistik, kondisi ini terlihat ketika standar objektivitas, kelayakan berita, dan otoritas narasumber dibangun berdasarkan norma maskulin, sehingga suara perempuan sering dianggap kurang ahli, kurang rasional, atau hanya relevan dalam isu domestik. Kramarae (1981) menunjukkan bahwa perempuan yang masuk ke ruang publik media harus “menerjemahkan” pengalamannya ke dalam bahasa yang disahkan oleh struktur maskulin agar bisa dianggap kredibel. Namun, penerjemahan ini justru berisiko menghapus pengalaman khas perempuan itu sendiri.

Selain itu, dominasi media sebagai ruang publik memperkuat proses pembungkaman karena kelompok dominan tidak hanya mengontrol siapa yang boleh berbicara, tetapi juga bagaimana suatu isu dibingkai. Meares menjelaskan bahwa kelompok dominan menguasai agenda diskusi melalui institusi

seperti media massa, pendidikan, dan politik, sehingga suara kelompok non-dominan hanya muncul jika sesuai dengan norma dominan tersebut (Meares, 2017). Akibatnya, pengalaman perempuan, kelompok minoritas, dan komunitas marjinal sering terpinggirkan secara sistemik, bukan karena mereka tidak berbicara, tetapi karena struktur media tidak menyediakan ruang yang setara bagi mereka.

Media adalah pembawa berita dan informasi dalam masyarakat modern yang diperlukan bagi khalayak agar bisa berperan aktif dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial dan budaya. Pengaruh media massa pun telah tumbuh dengan pesat pada beberapa dekade terakhir. Akibatnya, tanggung jawab besar ditempatkan di tangan sejumlah kecil orang dan institusi, yaitu media dan perusahaan media (Long, Paul; Wall, 2012). Karena media ada dalam setiap sendi kehidupan khalayak, artinya bahwa orang semua dalam tingkatan tertentu terpengaruh dari apa yang disaksikan, dengar, mainkan dan baca dari media. Ada hubungan langsung antara stimulus eksternal dari media dan respons dari dalam diri khalayak media. Media merasuk dalam karakter psikologi manusia, mempengaruhi pikiran dan menjadi alasan seseorang melakukan suatu tindakan (Laughey, 2007).

Media memainkan peran penting dalam gerakan feminisme global, namun belum banyak diteliti. Struktur media di berbagai tempat masih dikuasai oleh kepemilikan laki-laki yang memegang kontrol, sehingga perempuan sulit mendapatkan akses pada produksi media, sebagai profesional maupun warga biasa (Byerly & Ross, 2008). Perempuan profesional secara umum masih berada di luar lingkaran dalam penerbitan media. Hal itu menyebabkan perempuan masih dilihat sebagai subjek yang termarginalkan dan tidak terwakilkan dalam konteks media. Meskipun secara visual kita melihat perempuan bicara dan muncul di media, namun secara umum laki-laki masih mengendalikan apa yang dibicarakan, dan kapan boleh dibicarakan dan seberapa besar ruang yang boleh diambil dan dipakai oleh perempuan.

Stereotip gender perempuan banyak ditemukan di media, seperti misalnya perempuan di dunia modelling selalu diwakili oleh model kurus tinggi, sementara model pria bertubuh berotot. Ada juga nilai-nilai yang selalu dilekatkan dalam keperempuanan, misalnya sukses yang didefinisikan sebagai kesuksesan dalam menjalin hubungan heteroseksual dan bukan sukses dalam karier atau pencapaian pendidikan (Laughey, 2007). *Framing* ini bukan hanya terjadi di televisi atau media tertentu, tapi sudah menjadi fenomena global yang bertahan dalam waktu yang lama.

Gerakan feminisme mewujud dalam keterwakilan perempuan di media, sehingga pada tahun 2010-2020 ada peningkatan keterwakilan perempuan (Yahya et al., 2021). Meski demikian, riset ini juga menegaskan adanya marginalisasi perempuan di kantor-kantor berita yang menyebabkan perempuan menghilang dari diskursus politik. Organisasi media menyeleksi dengan ketat pakar yang menganalisis dan mengartikan isu-isu utama, dan perempuan seringkali tidak dipilih untuk membicarakan isu politik. Ini sangat kontras dengan prinsip dasar jurnalisme yang mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keberimbangan.

Meskipun gerakan perempuan sudah berlangsung selama berdekade-dekade dengan banyak pencapaian baik secara hukum maupun budaya, seksisme di media tetap bercokol dengan stabil (Byerly & Ross, 2008). Tentu saja perempuan tidak hanya diam dan berpangku tangan menyaksikan hal tersebut, dan sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, atau memproduksi berita alternatif dan struktur media lainnya.

Ada pula teori media feminis yang menerapkan filosofi, konsep, dan logika dan konsep feminis pada proses media seperti perekrutan, produksi, dan distribusi. Juga pada pola representasi dalam berita dan hiburan di seluruh platform; dan pada penerimaan. Tidak seperti pendekatan yang menyembunyikan politiknya, teori feminis secara eksplisit bersifat politis. Ia membahas kekuasaan. Teori media feminis menganggap serius gender sebagai faktor yang menyusun identitas dan pengalaman. Asumsi yang telah lama mendominasi teori media feminis adalah: jika perempuan mengendalikan produksi media, konten akan berbeda dan lebih baik (Fortner dan Fackler, 2014). Teori

interseksional tentang seksualitas sebagian besar mengabaikan perempuan kulit berwarna, minoritas seksual, orang-orang yang terpinggirkan oleh ketidakmampuan fisik atau kognitif. Teori media feminis dan seluruh bidang studi media feminis semakin menekankan tentang pentingnya kerja internasional dan multidisiplin yang secara serius membahas konvergensi dan globalisasi media (Fortner dan Fackler, 2014).

Namun, bagaimana media merepresentasikan perempuan adalah gambaran penting bagi mereka yang melihat, mendengar dan membaca media. Media, dengan khalayak media yang besar, adalah lakon utama yang menguasai pembentukan agenda berita, dan berperan secara budaya dalam membentuk *framing* akan isu-isu yang penting, termasuk membentuk pandangan gender. Misalnya, jika media tidak memberitakan pandangan hakim perempuan, anggota dewan perempuan dan pebisnis perempuan, namun selalu melaporkan kekerasan terhadap perempuan, maka tidak heran jika masyarakat memandang perempuan sebagai korban dan bukannya pengambil keputusan penting dalam masyarakat (Byerly & Ross, 2008). Model kepemimpinan relasional berguna untuk memahami kepemimpinan perempuan sebagai kolaboratif dan dibangun dengan cara yang mempertimbangkan gender. Selain itu, banyak tindakan relasional perempuan dapat dipahami sebagai bentuk kepemimpinan karena tindakan tersebut menyebabkan perubahan organisasi menuju kesetaraan gender yang lebih besar dalam industri media (O'Brien, 2017). Diskriminasi terhadap jurnalis perempuan serta ketimpangan posisi kepemimpinan di ruang redaksi dapat dipahami lebih mendalam melalui kerangka *muted group theory*. Teori ini memberikan perspektif kritis terhadap bagaimana struktur bahasa dan budaya institusional dalam media beroperasi untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu dan menyingkirkan pengalaman kelompok lain dari wacana utama. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian menyoroti bagaimana jurnalis perempuan tidak hanya menghadapi hambatan praktis dan struktural, tetapi juga mengalami proses pembungkaman simbolik dalam sistem komunikasi organisasi media yang berorientasi maskulin.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengambil data terkait jumlah pemimpin redaksi perempuan di Indonesia. Informasi ini diambil dari data perusahaan pers di Dewan Pers yang termuat di laman website resmi Dewan Pers, yaitu <https://dewanpers.or.id/data>. Data tersebut mencantumkan nama-nama pemimpin redaksi media di Indonesia, dan untuk mengetahui berapa pemimpin redaksi perempuan, maka setiap *entry* media diperiksa untuk melihat nama pemimpin medianya. Beberapa nama yang tidak jelas jenis kelaminnya dipastikan kembali dengan mencari nama tersebut di Google untuk melihat apakah pemimpin redaksi dengan nama tersebut adalah perempuan atau laki-laki.

Selain itu, penelitian juga melakukan studi literatur untuk menelaah, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi literatur, peneliti memperoleh pemahaman tentang teori, konsep, temuan empiris, serta kesenjangan penelitian yang telah ada sebelumnya. Menurut Creswell (2014), tinjauan literatur berfungsi untuk “menempatkan penelitian dalam konteks pengetahuan yang telah ada” dan membantu peneliti membangun kerangka teoretis serta merumuskan arah penelitian yang jelas.

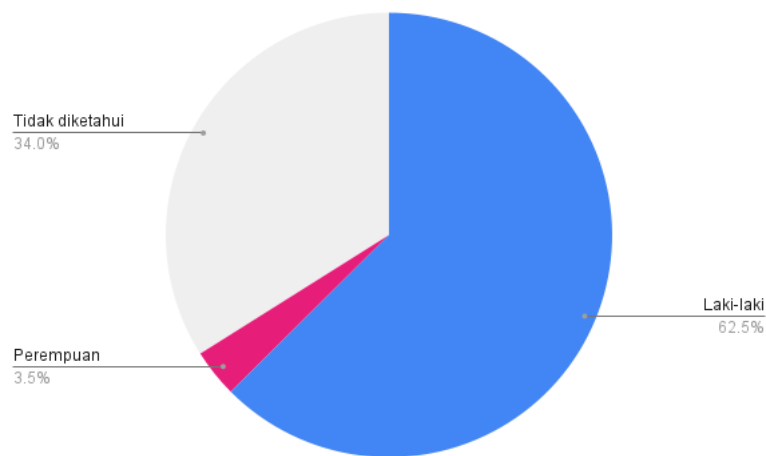
Snyder (2019) menjelaskan bahwa studi literatur tidak hanya sekadar merangkum penelitian terdahulu, tetapi juga menuntut kemampuan analitis untuk mensintesis informasi secara kritis guna mengidentifikasi pola, hubungan, dan perbedaan antarpenelitian. Dengan demikian, studi literatur menjadi landasan konseptual yang memungkinkan peneliti menjustifikasi relevansi dan kontribusi penelitian yang dilakukan.

Literatur yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, *proceeding* konferensi yang dicari dari Google Scholar. Untuk memastikan bahwa kondisi yang dilihat adalah kondisi terkini, penelitian yang dipilih adalah penelitian yang dilakukan dalam empat tahun terakhir, atau dipublikasikan pada 2021 hingga 2025. Kata kunci yang digunakan adalah: jurnalis perempuan, *female journalist in Indonesia*. Penelitian yang dimasukkan adalah 16 penelitian mengenai jurnalis perempuan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di perusahaan media di Indonesia masih sangat rendah, dengan kesenjangan yang tinggi antara pemimpin redaksi perempuan dan laki-laki. Temuan ini merefleksikan beroperasinya mekanisme pembungkaman sebagaimana dijelaskan dalam teori kelompok terbungkam (*muted group theory*). Dalam struktur media yang masih didominasi oleh laki-laki, standar kepemimpinan, pengambilan keputusan redaksional, serta definisi profesionalisme jurnalistik dibentuk berdasarkan perspektif kelompok dominan. Akibatnya, perempuan sebagai kelompok non-dominan menghadapi hambatan struktural untuk mengakses posisi strategis, meskipun memiliki kompetensi yang setara. Dominasi laki-laki dalam kepemimpinan ini sejalan dengan data Dewan Pers yang menunjukkan bahwa sebagian besar media di Indonesia dipimpin oleh pria dan hanya sedikit yang dipimpin oleh perempuan. Kondisi tersebut memperkuat proses pembungkaman secara institusional, karena perempuan tidak hanya dibatasi dalam akses terhadap ruang kuasa, tetapi juga dalam menentukan arah kebijakan redaksional, memilih isu yang dianggap penting, serta menentukan siapa yang layak menjadi sumber otoritatif. Dengan demikian, rendahnya kepemimpinan perempuan di media Indonesia bukan semata persoalan individu, melainkan hasil dari struktur komunikasi dan kekuasaan yang masih timpang.

Dewan Pers memublikasikan daftar media di Indonesia pada bulan Mei 2024 berjumlah 1.861 media yang terverifikasi secara administratif maupun faktual. Data media yang dipublikasikan tersebut mencakup antara lain nama media, jenis media (cetak, online, radio atau televisi), nama pemimpin redaksi dan alamat serta kontak media tersebut. Dari 1.861 media tersebut, hanya 65 media yang dipimpin oleh Perempuan; 1.164 media dipimpin oleh laki-laki, dan 632 media tidak mencantumkan nama pemimpin redaksinya sehingga tidak dapat diketahui jenis kelaminnya. Jumlah tersebut menunjukkan ketimpangan yang tinggi antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin media. Proporsi pemimpin redaksi perempuan hanya 3,2 persen dari seluruh media yang ada di Indonesia. Adapun jumlah pemimpin redaksi pria menguasai 62,4 persen media di Indonesia.



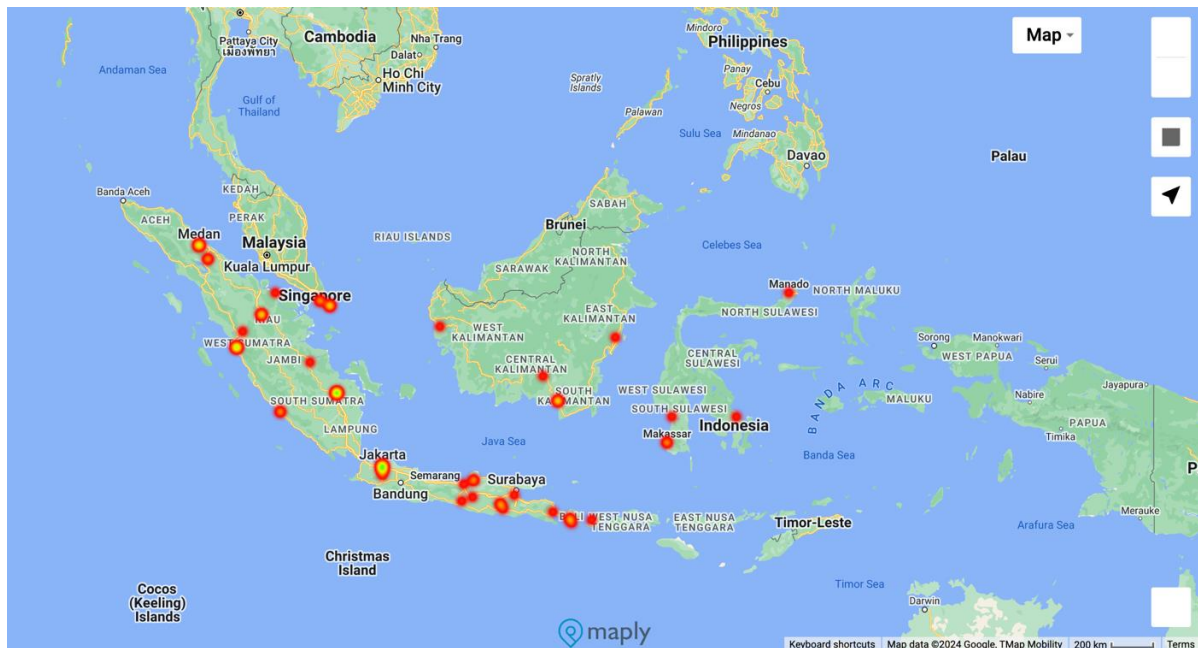
Gambar 1. Persentase pemimpin redaksi perempuan di Indonesia

Jumlah 3,5 persen ini menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi dari jumlah pemimpin redaksi pria, meskipun ada sepertiga dari angka tersebut tidak diketahui jenis kelaminnya. Dari 65 media tersebut, ada beberapa perempuan yang merangkap jabatan sebagai pemimpin di beberapa media dalam satu grup, sehingga hanya ada 52 individu perempuan yang menjadi pemimpin redaksi di Indonesia. Penyebaran pemimpin redaksi perempuan juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Dari 65 media yang dipimpin oleh perempuan ini, penyebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Ada beberapa provinsi dan kota yang memiliki lebih dari satu media yang dipimpin perempuan, dan ada pula provinsi yang tidak memiliki satu pun media yang dikepalai oleh perempuan. 65 media yang dipimpin oleh perempuan itu tersebar di 21 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia.

Hampir seluruh provinsi di Jawa memiliki media yang dipimpin oleh perempuan, kecuali di Provinsi Banten. Demikian juga dengan di Pulau Kalimantan, hanya provinsi termuda pulau itu yang tidak mencatat satu pun pemimpin perempuan, yakni di Kalimantan Utara. Di Pulau Sumatra, terdapat

pemimpin redaksi perempuan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau. Adapun Nanggore Aceh Darussalam, Lampung, Bangka Belitung tidak mencatat satu pun pimpinan media perempuan.

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara Bali, NTB memiliki setidaknya satu atau lebih pimpinan media perempuan, namun tidak demikian dengan NTT, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Ketimpangan tertinggi terlihat di wilayah timur Indonesia, yaitu di Maluku dan Papua. Dari delapan provinsi di kawasan tersebut, tidak ada satu pun pemimpin redaksi media yang berjenis kelamin perempuan.



Gambar 2. Lokasi pemimpin redaksi perempuan di Indonesia

Data Dewan Pers ini memiliki kekurangan, karena meskipun data ini adalah data utama jika ingin mengetahui tentang media yang terdaftar di Indonesia, namun tidak jelas kapan data ini diperbarui baik secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga ada beberapa data yang sudah tidak tepat. Data tidak diperbarui ini misalnya ada pemimpin redaksi yang sudah tidak menjabat atau meninggal dunia, seperti Titah Sri Rahayu yang masih tertulis sebagai pemimpin redaksi majalah Jaya Baya, padahal, yang bersangkutan sudah meninggal pada tahun 2020.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengambilan data secara lebih lengkap untuk mengetahui angka keseluruhan yang lebih terkini, dan juga bisa dikembangkan pada data jurnalis perempuan yang bekerja di media itu dan apakah hal itu berpengaruh dalam mendorong pemberitaan yang lebih mendorong kesetaraan gender.

Saat ini diskriminasi dalam ruang kerja jurnalis perempuan dialami para jurnalis perempuan yang bekerja di berbagai kota di Indonesia, seperti di Surabaya (Zanah et al, 2023), Jambi (Arfan, 2022), Banda Aceh (Ruzikna, 2024; Nofril, 2023). Palu (Antasari et al, 2023), Bandung (Mustopa et al, 2022) dan di Provinsi Sumatera Utara (Damayanti dan Alvira Rosa, 2023).

Kramarae (2005) menulis bahwa teori *muted group* menyatakan bahwa orang-orang yang berada dalam kelompok subordinat (tidak hanya perempuan tetapi juga suku, ras, seksualitas dan kelas sosial) mungkin punya banyak hal untuk disampaikan, tetapi cenderung tidak punya banyak kekuatan untuk mengungkapkannya tanpa menghadapi masalah. Ucapan mereka sering diabaikan oleh kelompok dominan, pengetahuannya dianggap tidak cukup untuk proses pengambilan keputusan publik atau pembuatan kebijakan di masyarakat; pengalaman mereka diinterpretasikan oleh orang lain.

Dalam kondisi krisis, pembedaan karena gender itu semakin dirasakan. Saat meliput konflik, kemampuan jurnalis perempuan kerap dipertanyakan, padahal perempuan mampu melakukan peliputan di daerah konflik. Perempuan harus bekerja lebih keras jika dibandingkan para rekan laki-laki untuk

menunjukkan kemampuan mereka (Widyaningtyas et al, 2023). Padahal, perempuan bisa membawa perspektif berbeda yang tidak dimiliki oleh jurnalis laki-laki, dan pada akhirnya memberikan kontribusi penting dalam memahami isu-isu di wilayah konflik.

Ketika terjadi kondisi kedaruratan seperti Covid-19, kembali perempuan mengalami diskriminasi, bahkan dengan eskalasi yang lebih ekstrim, seperti pada media yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara berat sebelah terhadap mereka yang berpenghasilan tinggi (Sarwono et al, 2023). Selama pandemi Covid-19, kekerasan terhadap jurnalis perempuan meningkat, termasuk kekerasan fisik, serangan digital, intimidasi, dan penghancuran barang saat peliputan. Diskriminasi berbasis gender juga semakin kuat (Khairunissa, V. L., & Nurrobby, 2021).

Selain itu, jurnalis perempuan juga menghadapi diskriminasi dalam penempatan liputan. Selain tidak dipercaya dalam meliput konflik, mereka sering diremehkan dan tidak dipercaya untuk meliput acara penting seperti demonstrasi (Dinda Pratiwi et al, 2021; Hardiyanti, 2021). Juga, masih ada anggapan bahwa pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan laki-laki dan tidak seharusnya dilakukan oleh perempuan (Nofril, 2023).

Liputan olahraga oleh jurnalis perempuan sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan hasil liputan pekerja laki-laki. Untuk mendapatkan pengakuan yang setara atau dianggap sebagai bagian dari kelompok laki-laki, jurnalis perempuan harus bekerja lebih keras. Mereka harus meningkatkan pengetahuan demi menaikkan reputasi mereka di mata narasumber dan wartawan pria (Putri et al, 2022).

Diskriminasi juga terjadi dalam derajat yang bervariasi terhadap jurnalis foto perempuan. Ketiadaan dukungan psikologis dan mental dari media tempat mereka bekerja membuat jurnalis-jurnalis ini harus mengatasi masalah mental mereka sendiri selama pandemi (Sarwono et al, 2023). Secara hukum, sebenarnya sudah ada aturan yang melindungi jurnalis, dan termasuk jurnalis perempuan. Namun, perlindungan itu masih terbatas hanya pada hukum tertulis. Penegakan hukum masih dinilai kurang, undang-undang dan aturan lainnya tidak digunakan dengan efektif, ditambah dengan oligarki yang menghambat kebebasan pers, membuat jurnalis perempuan belum terlindungi (Hardiyanti, 2021).

Pelecehan seksual menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang umum, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal (Mustopa et al, 2022) yang dilakukan oleh narasumber (Asnaura et al, 2021; Dinda Pratiwi et al, 2021) maupun rekan kerja sendiri (Dinda Pratiwi et al; Ruzikna, 2024). Ini termasuk godaan melalui pesan aplikasi setelah wawancara, candaan seksis dari atasan dan rekan kerja laki-laki di kantor, dan sentuhan fisik saat mengikuti narasumber ke acara (Dinda Pratiwi et al, 2021).

Diskriminasi juga terkait dengan pemenuhan hak-hak normatif jurnalis perempuan di industri media. Banyak media yang belum menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang laktasi, cuti haid, dan ruang penitipan anak. Pelaksanaan hak-hak ini masih kurang, menghambat kesejahteraan dan produktivitas jurnalis perempuan yang harus melakukan dua peran antara pekerjaan dan keluarga (Dinda Pratiwi et al, 2021; Ruzikna, 2024; Damayanti dan Alvira Risa, 2023).

Dampaknya nyata terlihat dalam hal perkembangan karier. Di tingkat reporter, proporsi jurnalis laki-laki mencapai 64%, sedangkan jurnalis perempuan sebesar 36%. Namun, ketika kita melihat struktur manajerial, perubahan dramatis terjadi. Angka tersebut melonjak, dengan 77% posisi manajerial dipegang oleh laki-laki, sementara hanya 23% yang diisi oleh perempuan. Disparitas ini menyoroti ketidakseimbangan gender yang signifikan di dalam hierarki organisasi media. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan menghadapi lebih banyak hambatan dalam mencapai posisi manajerial dan mendapatkan pengakuan yang setara dengan para pria (Dwifatma, 2021). Di Aceh, karier sejumlah jurnalis perempuan terhambat dan stagnan pada posisi jurnalis lapangan saja meski sudah bekerja hingga 7 tahun (Ruzikna, 2024).

Setidaknya ada tiga faktor utama yang menghambat karir jurnalis perempuan di Indonesia menurut Dwifatma (2021) yang meneliti 811 jurnalis dari 10 media. Tiga faktor itu adalah beban ganda dalam mengurus karir dan rumah tangga, hambatan mental, dan politik kantor yang cenderung maskulin. Pertama, beban ganda yang dipikul oleh jurnalis perempuan saat mengembangkan karir menjadi kesimpulan yang sering muncul dalam beberapa penelitian (Dwifatma, 2021; Sarwono et al, 2023; Asnaura et al, 2021; Ruzikna, 2024; Antasari et al, 2023; Nofril, 2023; Damayanti dan Alvira Rosa, 2023).

Hal itu terjadi terutama bagi mereka yang memiliki keluarga. Anggota keluarga lainnya, seperti orang tua, turut mempengaruhi keputusan jurnalis foto perempuan dalam memilih peran profesionalnya. Selain itu, diskriminasi karena status sebagai ibu masih terjadi di lingkungan kerja media. Hal ini

membuat jurnalis foto perempuan tidak memiliki pilihan dalam bidang pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan keinginan mereka (Sarwono et al, 2023).

Beban ganda ini dalam bentuk tuntutan yang datang dari pihak eksternal (baik keluarga dan masyarakat), serta internal atau dari dalam diri sendiri. Tak peduli seberapa tinggi pencapaian karir perempuan, rumah tangga dan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab utama. Akhirnya, hal ini mengakibatkan perempuan ditempatkan dalam peran ganda yang 'harus atau tidak akan' dipenuhi.

Faktor kedua yang juga berperan dalam jalur karir jurnalis perempuan adalah hambatan mental dari perspektif jurnalis perempuan itu sendiri. Beberapa jurnalis perempuan dalam FGD mengakui bahwa mereka merasa ngeri jika harus mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi daripada saat ini (Dwifatma, 2021).

Faktor ketiga yang menghambat karir jurnalis perempuan adalah budaya politik kantor yang maskulin. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar jurnalis yang bekerja di media adalah laki-laki dibandingkan dengan jurnalis perempuan. Aspek politik kantor yang maskulin dapat ditunjukkan oleh keengganan media untuk merekrut jurnalis perempuan karena sudah dibangun asumsi bahwa akan ada seleksi alamiah bagi jurnalis perempuan, yaitu akan mengundurkan diri setelah menikah atau memiliki anak (Dwifatma, 2021).

KESIMPULAN

Masih ada diskriminasi pada jurnalis perempuan berdasarkan gender, dan beban ganda yang harus dipikul oleh jurnalis perempuan dalam menjalankan tugasnya. Perempuan harus bekerja lebih keras jika dibandingkan para rekan laki-laki untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tak peduli seberapa tinggi pencapaian karir perempuan, rumah tangga dan anak-anak tetap menjadi tanggung jawab utama. Akhirnya, hal ini mengakibatkan jurnalis perempuan ditempatkan dalam peran ganda sebagai wartawan dan juga sebagai pengurus rumah tangga utama, suatu hal yang tidak dirasakan oleh jurnalis laki-laki.

Sementara itu, tidak banyak jurnalis perempuan yang berhasil mencapai posisi puncak sebagai pemimpin redaksi di Indonesia. Dari 1.861 perusahaan media yang tercatat di Dewan Pers, hanya 65 media yang dipimpin oleh perempuan. Proporsi pemimpin redaksi perempuan hanya 3,2 persen dari seluruh media yang ada di Indonesia. Adapun jumlah pemimpin redaksi pria menguasai 62,4 persen media di Indonesia.

Beban ganda dipikul oleh jurnalis perempuan, yang terpaksa membagi fokusnya antara profesionalisme dan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menunjukkan bagaimana perempuan harus menyesuaikan pengalaman mereka ke dalam kerangka kerja maskulin agar dapat diakui setara dalam dunia profesional yang dibangun berdasarkan nilai-nilai laki-laki. Mereka dituntut bekerja lebih keras untuk mendapatkan legitimasi, namun tetap diukur dengan standar yang tidak mereka bentuk. Akibatnya, ruang representasi perempuan dalam media, termasuk dalam struktur kepemimpinan redaksi, menjadi sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, C., Haidar, N & Retno, R. (2023). Eksistensi Jurnalis Perempuan sebagai Kontributor. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 684-689
- Arfan, A. (2022). The Female Journalist Leadership and Gender Mainstreaming in Jemberita.com Media in Jambi. *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 6(1), 115.
- Asnaura, A., Zahrani, N., & Alifia Suryadi, S. (2021). Women, Journalism and Discrimination in Indonesia Digital Media. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 2(2), 81-94.
- Barkman, L. L. S. (2018). Muted Group Theory: A Tool for Hearing Marginalized Voices. *Priscilla Papers*, 32(4), 3-7. <https://www.cbeinternational.org/resources/article/priscilla-papers/muted-group-theory-tool-hearing-marginalized-voices>
- Byerly, C. M., & Ross, K. (2008). Women and Media: A Critical Introduction. In *Women and Media: A Critical Introduction*. Blackwell Publishing Ltd.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Damayanti, A. R. (2023). Tantangan Jurnalis Perempuan di Era Digital dalam Menyeimbangkan Peran Antara Karier dan Keluarga pada Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Sumatera Utara. *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*.

- Dwifatma, A. D. (2021). Barriers to Career Advancement of Female Journalists in Indonesia. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.22515/al-balagh.v6i1.3309>
- Fortner, R. S., & Fackler, P. M. (2014). *The Handbook of Media and Mass Communication Theory*. <https://doi.org/10.1002/9781118591178>
- Hardiyanti, E. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2). <https://doi.org/10.19184/idx.v2i2.24959>
- Khairunissa, V. L., & Nurrobby, M. I. (2021). Legal Protection of Female Journalists over Gender Inequality during the Covid-19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 5(2), 123–136. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50438>
- Kirsten, E.S, Nielsen, R. K. (2022). Women and Leadership in the News Media 2022: Evidence from 12 Markets. *Reuters Institute for the Study of Journalism*.
- Kramarae, C. (2005). Muted Group Theory and Communication: Asking Dangerous Questions. *Women and Language*, 28(2), 55–61.
- Laughey, D. (2007). *Media Studies Theoris and Approaches*. Kamera Books.
- Long, P; Wall, T. (2012). Media Studies: Texts, Production, Context. In *Pearson Education Limited*.
- Meares, M. (2017). Muted Group Theory. In Y. Y. Kim (Ed.), *The International Encyclopedia of Intercultural Communication*. Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118783665>
- Mustopa, R., Kurniawan, A. W., & Septianti, S. (2022). Eksistensi Jurnalis Perempuan dalam Mempertahankan Kesenjangan Gender di Inspira TB Bandung. *Jurnal Komunikasi dan Media*. 6(2),
- Nofril, R. (2023). Jurnalis Perempuan pada Sistem Patriarki (Studi Kasus terhadap Jurnalis Perempuan di Redaksi Serambi Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala*.
- O'Brien, A. (2017). Feminine or feminist? Women's media leadership. *Feminist Media Studies*, 17(5). <https://doi.org/10.1080/14680777.2017.1300593>
- Pratiwi, H.D., Sunarto, S & Lukmantoro, T. (2021). Diskriminasi Gender terhadap Jurnalis Perempuan di Media. 9(3), 111-125. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/31414>
- Putri, R. C., Pakasi, D. T., & Santoso, W. M. (2022). Pengalaman Perempuan Jurnalis Olahraga dan Maskulinitas Peliputan Olahraga. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i2.2102>
- Ritonga, R., Murwani, E., & Ritonga, S. (2017). Gender Awareness of Maria Hartiningsih as Kompas Reporter. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(2), 82–91. <https://doi.org/10.25008/jkisk.v2i2.102>
- Ruzikna, A. (2024). *Problematisasi Ruang Gerak Jurnalis Perempuan di Aceh*.
- Sarwono, B., Yasak, E. M., Ajidarma, S. G., & Asteria, D. (2023). Female photojournalist discrimination during the Covid-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(1), 164–178. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i1.5622>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Wall, C. J., & Gannon-Leary, P. (1999). A sentence made by men: Muted group theory revisited. *European Journal of Women's Studies*, 6(1) <https://doi.org/10.1177/135050689900600103>
- Wendratama, E., Masduki, & Afrida, N. (2023). *Jalan Terjal Menuju Kesenjangan (Laporan Riset Diskriminasi Gender di Organisasi Media)*.
- Widyaningtyas, M. D., Abdullah, A., Karlinah, S., & Priyatna, A. (2023). Tantangan Profesi Jurnalis Perempuan dalam Liputan di Wilayah Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2). <https://doi.org/10.31315/jik.v21i2.7725>
- Yahya, U., Anwar, R. H., & Zaki, Prof. Dr. S. (2021). Third Wave Feminism and Women's Invisibility in the Discourse of Politics. *Pakistan Journal of Gender Studies*, 21(2), 133–152.
- Zanah, F.A.M., Suprihatin, S & Wulandari, E.R. (2023). Gender Discrimination by Female Journalists Against Companies in the Media. *DIGICOM: Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(4), 253–260. <https://doi.org/10.37826/digicom.v3i4.597>